

NGAMPRAH, (PRLM-A-179/A-147).- Pemerintah diharapkan tetap memperhatikan kepentingan warga sekitar, terutama setelah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan Hulu (Pump Storage Upper Cisokan) di Kabupaten Bandung Barat direalisasikan.

Untuk itu mereka meminta kesempatan untuk duduk bersama. "Kami ingin agar masyarakat setempat juga diajak bicara. Jangan sampai nanti warga sekitar dikorbankan," kata Wakil Ketua Pusat Peran Masyarakat Pembangunan Cisokan (PPMPC), Ade Bahtiar.

Seperti diberitakan sebelumnya, di Kabupaten Bandung Barat bagian selatan rencananya akan dibangun megaproyek PLTA Cisokan Hulu. Listrik yang dihasilkan akan masuk pada jaringan listrik Jawa-Bali. PLTA itu akan menggunakan empat mesin, masing-masing dengan kapasitas pembangkit 260 MW. Harga mesin untuk pembangkit 1 mw sekitar 800.000 dolar AS (sekitar Rp 7,4 miliar). Artinya, untuk membangun pembangkitnya saja dibutuhkan dana sekitar 800 juta dolar AS atau sekitar Rp 8 triliun.

Pembangunan PLTA Cisokan dengan kapasitas total 1.040 MW ini akan berdiri di wilayah Kecamatan Cipongkor dan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Sebanyak 12.000 jiwa yang akan terkena dampaknya pembangunan megaproyek PLTA itu.

Warga yang akan tergusur karena proyek tersebut sekitar 300 keluarga, dengan lahan seluas 393 hektare. Rencananya, mereka direlokasi ke lahan pengganti yang sampai saat ini belum ada. Untuk lahan pengganti itu, PLN memiliki kewajiban mengganti dua kali lipat dari lahan yang digunakan atau hampir 800 hektare.

Pekan lalu, Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengemukakan, persyaratan yang harus dilengkapi PLN untuk membangun PLTA Cisokan Hulu masih belum dilengkapi. Padahal, jika sampai Desember 2010 perlengkapan itu belum dilengkapi, penandatanganan perjanjian utang senilai Rp 6 miliar dengan Bank Dunia terancam mundur sampai satu tahun.

Dia memperkirakan, persoalan terjadi karena perbedaan penafsiran tentang aturan perizinan sehingga berbagai persyaratan yang sudah dipenuhi PLN masih dianggap kurang. Dia

berharap, dalam waktu dekat ini persoalan penafsiran aturan itu bisa segera diselesaikan.

Berkaitan dengan rencana pembangunan PLTA Cisokan, Ade khawatir warga Rongga dan Cipongkor akan tersisih setelah proyek selesai. Kekhawatiran tersebut bercermin kepada pembangunan Waduk Saguling sekitar 25 tahun lalu. Dia menilai, manfaat besar yang diberikan Saguling bagi masyarakat luas justru tidak dinikmati penduduk setempat. Terlebih karena "kesibukan" persiapan PLTA Cisokan terkesan hanya terjadi di kalangan birokrasi. Sementara masyarakat setempat tidak banyak mengetahui perkembangannya.